

# Pendidikan Budaya Bahari Memperkuat Jati Diri Bangsa

Heni Waluyo Siswanto

[hewalsi@yahoo.com](mailto:hewalsi@yahoo.com)

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud

Disubmit  
27 November 2018

Direvisi  
19 Desember 2018

Diterima  
30 Desember 2018

<http://dx.doi.org/10.17509/jpis.v27i2.14096>

## ABSTRACT

*Indonesia is geographically an archipelago with two-thirds of the ocean area larger than the mainland. This can be seen with the presence of coastlines on almost every island in Indonesia ( $\pm 81,000$  km) which makes Indonesia rank second after Canada as the country that has the longest coastline in the world. In addition, marine waters in Indonesia are known as one of the important "mega biodiversity" regions in the world and also contain significant potential resources, both in the form of diversity of natural resources and artificial resources. The maritime cultural education in question is life behavior and human procedure as a nation's society towards the sea and the utilization of all the potential of maritime wealth that is in, above, and around the sea to fulfill the needs of the people and the economy of a country today and in the future by exploring and developing ideas / ideas in the form of knowledge, social norm systems and technology that supports them.*

**Keywords:** Maritime Culture, National Identity, Formal Education.

## ABSTRAK

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia ( $\pm 81.000$  km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, perairan laut di Indonesia dikenal sebagai salah satu daerah "mega biodiversity" penting di dunia dan juga mengandung potensi sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pendidikan budaya bahari yang dimaksud yakni perilaku hidup dan tata cara manusia sebagai masyarakat suatu bangsa terhadap laut dan pemanfaatan seluruh potensi kekayaan maritim yang ada di dalam, di atas, dan di sekitar laut guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara saat ini dan masa datang dengan menggali dan mengembangkan gagasan/ide berupa pengetahuan, sistem norma sosial dan teknologi yang mendukungnya.

**Kata Kunci:** Budaya Bahari, Jati Diri Bangsa, Pendidikan Formal.

## PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia mempunyai posisi yang strategis. Tidak saja karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia, tetapi juga karena kepulauan

ini terletak di antara dua samudra, Pasifik dan Indonesia. Posisi ini membuat Kepulauan Indonesia menjadi tempat persilangan budaya dalam pergaulan antarbangsa di kawasan ini.

Bahkan, di zaman praaksara kawasan ini menjadi daerah perambahan yang menantang manusia untuk menjelajahnya. Ketika permukaan air laut turun, pada jaman es, pulau-pulau di kawasan barat bergabung dengan daratan Asia menjadi Paparan Sunda, sedangkan di kawasan timur Pulau Irian dan Aru bergabung dengan Daratan Australia menjadi Paparan Sahul. Di antara dua daratan luas itu, terdapat Zona Wallacea yang ditempati oleh Pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil lainnya yang kini termasuk wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur berada diantara 60 LU – 110 LS dan 950 BT – 1410 BT (Sungkawa, 2017)

Wilayah negara Republik Indonesia sebelumnya mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Namun, tanggal 13 Desember 1957 Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, mencetuskan sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) dimana wilayah lautnya meliputi laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Isi deklarasi Djuanda ini memiliki makna bahwa: (1) Indonesia

menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; (2) Sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan; (3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat; untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan; dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Deklarasi Djuanda selanjutnya dikuatkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat luasnya dari 2.027.087 km<sup>2</sup> menjadi 5.193.250 km<sup>2</sup> dengan pengecualian Irian Jaya meskipun berada di wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.

Selanjutnya, melalui Menteri Luar Negeri pada saat itu, Mochtar Kusumaatmadja, dicetuskanlah konsep Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mencakup perwujudan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan budaya, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Semua laut dalam (laut di antara pulau di Nusantara) yang dengan ketentuan 12 mil merupakan laut bebas, tidak lagi menjadi laut internasional tetapi sebagai laut pedalaman yang menjadi

bagian kawasan laut teritorial dari suatu negara kepulauan.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, pada tahun 1982 akhirnya konsep wilayah wawasan nusantara ini dapat diterima dan ditetapkan melalui konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang diakui dan dijamin kedaulatan dan hak berdaulat maritimnya oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, luas wilayah laut NKRI mencapai 6,65 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 76,94% dari luas total wilayah negara yang menghubungkan sebanyak 17.499 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke (Ramdhan dan Arifin, 2013). Sejumlah 13.466 pulau di antaranya sudah diverifikasi serta dan telah terdaftar di PBB (Dishidros TNI AL, 2004).

Peran laut ini sangat penting bukan hanya sebagai sumber penyedia pangan dan energi tetapi juga merupakan wahana pemersatu Nusantara. Bahkan kebesaran Bangsa Indonesia pada masa lalu telah mencatat memiliki kejayaan di bidang maritim seperti pada Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang telah menunjukkan sebagai negara berbasis maritim yang memiliki pelaut-pelaut tangguh dengan didukung peralatan

kapal-kapal yang mampu mengaruhi samudra hingga ke luar batas wilayah.

Kontribusi di bidang bahari bagi negara Indonesia cukup besar. Hal ini dapat dibuktikan sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 20,06% pada tahun 1998, meningkat menjadi 23,57% pada tahun 2002, kontribusi ini didominasi oleh kegiatan ekstraksi migas dan sumberdaya mineral di laut. Di luar sumbangan dari sektor migas, Perikanan dan Kelautan berkontribusi 3,21% terhadap PDB tahun 2013 dan diperkirakan dapat mencapai 6,5% di akhir tahun 2014. PDB dari kegiatan perikanan mengalami kenaikan rata-rata Rp. 18 milyar/tahun dari tahun 2000 - 2013 (BPS, 2014).

Dari sektor pariwisata untuk tahun 2013 ada kenaikan 10,99% dari tahun sebelumnya. Bahkan dari pariwisata bahari menyumbang kurang lebih 30% dari total pemasukan pariwisata nasional US\$ 10,1 milyar (BPS, 2014). Kondisi wilayah negara Indonesia yang kaya ini ternyata memiliki permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi di sektor bahari misalnya pelayaran tradisional mulai menghilang karena faktor ekonomi, bahan baku, dan teknologi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dan globalisasi berdampak tidak baik kepada masyarakat nelayan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti kemiskinan yang sebagian besar pada segmen nelayan tradisional, konflik diantara kelompok-kelompok nelayan, terkurasnya sumber daya laut dan kerusakan laut khususnya pada terumbu karang (Ardiwidjaja, 2016). Kerusakan terumbu karang ini dari data sebesar 25 juta hektar luas terumbu karang di Indonesia kondisinya 5% sangat baik, 27,01% baik, 37,97% sedang, dan 30,02% kondisi buruk (Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016). Sehingga kondisi ini berpengaruh berkurangnya biota laut tertentu dan meningkatkan risiko bencana di wilayah pesisir Indonesia.

Penelitian lain menyebutkan ada 3 permasalahan kebaharian (Samekto, 2017) di Indonesia yaitu: (1) dampak pembangunan industri. Tidak semua industri dilengkapi instalasi pengolahan air limbah, sehingga sering mencemari sungai dan berdampak mencemari laut. (2) dampak deforestasi. Fakta di lapangan menunjukkan banyak hutan yang telah diubah fungsinya, baik untuk tujuan pertanian atau pemukiman. Dampaknya menghasilkan tingkat sedimentasi yang tinggi di perairan pesisir dan dampak deforestasi hutan mangrove atau pembukaan lahan di banyak daerah pesisir, seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, untuk pengembangan perikanan dan produksi arang mengakibatkan penurunan jumlah total ikan yang ditangkap di daerah-daerah; (3) praktik merusak ekosistem pesisir. Sebagian besar industri terletak di daerah pesisir, daerah operasi penangkapan ikan dari nelayan skala kecil menjadi sempit. Sementara itu, sebagian besar masyarakat nelayan, memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang rendah, sebagian hanya selesai Sekolah Dasar (Preliminary Sekolah), dan beberapa dari mereka bahkan tidak lulus. Oleh karena itu dalam kondisi ini, sangat sulit bagi mereka untuk bersaing dengan nelayan dengan teknologi penangkapan ikan yang modern.

Penelitian (Tinambunan, 2016) menemukan setidaknya ada empat faktor utama yang menjadi penghambat penguatan budaya maritim, yakni (1) kurangnya peranan pemerintah; (2)

peran masyarakat pesisir yang rendah; (3) masalah permodalan; (4) pemasaran. Pemasaran yang dilakukan masyarakat pesisir yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dilakukan melalui perantara pengepul.

Sedangkan penelitian (Ambariyanto & Denny, 2012) menyebutkan terdapat empat persoalan yang dihadapi wilayah pesisir di Indonesia secara umum, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, tercatat pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7 juta jiwa yang terdapat 10.639 desa pesisir; (2) tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Pembangunan memerlukan berbagai sumberdaya sebagai modal dalam pembangunan.

Berbagai permasalahan yang terkait dengan kebaharian ini tidak akan terselesaikan tanpa upaya konkret untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui upaya pendidikan. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, permasalahan tentang kebaharian ini salah satunya adalah melalui peningkatan kapasitas pendidikan budaya bahari kepada peserta didik/siswa (selanjutnya disebut siswa) dimulai dari anak usia dini hingga pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dunia kebaharian ini telah menarik perhatian bagi para peneliti dan akademisi untuk membahasnya meski berbeda fokus dan sudut pandang dalam penelitiannya. Beda penelitian-penelitian sebelumnya dengan kajian pengembangan dalam tulisan ini yakni penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan kepada hubungan

bahari dengan dampak modernisasi dan globalisasi bagi masyarakat nelayan, dengan manajemen pengelolaan sumber laut, pemberdayaan masyarakat pesisir. Sedangkan penulis menitikberatkan pada peningkatan kapasitas wawasan siswa melalui pendidikan budaya bahari di sekolah berikut model strategi implementasinya di sekolah. Penulisan yang terkait dengan pendidikan budaya bahari di pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah masih relatif jarang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait dengan kebaharian di wilayah Indonesia, maka dalam makalah ini penulis membatasi permasalahan dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut (1) apa yang dimaksud dengan pendidikan budaya bahari? (2) muatan pendidikan budaya bahari seperti apa yang dapat meningkatkan wawasan kebaharian pada siswa? dan (3) Bagaimana bentuk implementasi muatan pendidikan budaya bahari dalam pembelajaran di sekolah?

Dengan demikian tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui pemahaman tentang pendidikan budaya bahari, isi muatan dari pendidikan budaya bahari, dan cara atau strategi implementasinya di sekolah.

## PEMBAHASAN

Seringkali kita mendengar beberapa istilah yang berhubungan dengan laut seperti bangsa Indonesia adalah bangsa bahari, poros maritim dunia, lautan Indonesia kaya akan hasil laut. Ada 3 penyebutan yang menggambarkan tentang laut yakni bahari, maritim, dan lautan. Dari ketiga

istilah ini bahkan digunakan orang namun tidak tahu apa perbedaannya.

Kelautan adalah kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau; perihal yang berhubungan dengan laut. (Departemen Pendidikan Indonesia, 2008). Dengan demikian kelautan memiliki pengertian bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di wilayah laut yang meliputi permukaan laut, kolom air, dasar laut dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pesisir, pantai, pulau kecil, serta ruang udara di atasnya.

Menurut KBBI, maritim adalah sesuatu yang berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan Kemaritiman adalah hal-hal yang menyangkut masalah maritim. Menurut *Oxford Dictionaries*, “*Maritime is Connected with the sea, especially in relation to seaborne trade or naval matters*”. Dengan demikian kemaritiman adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu pada pelayaran/ pengangkutan laut, perdagangan (*sea-borne trade*), navigasi, keselamatan pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, wisata laut, kepelabuhanan baik nasional maupun internasional, industri dan jasa-jasa maritim.

Kebaharian adalah orang-orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, dan kelautan. Orang yang bekerja di laut atau pelayaran, disebut pelaut, dengan obyeknya adalah laut. Jadi dapat dikatakan bahari lebih kepada pelaku atau orang-orang yang beraktifitas di laut atau kehidupan masyarakat yang memiliki profesi sebagai pelaut dan memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan beraktifitas di laut di masa lalu. Bahari sendiri berasal dari bahasa Arab/ Afrika yaitu “bahar” yang artinya manusia laut atau manusia yang beraktifitas di laut (Motik, 2010).

Dari ketiga istilah Kemaritiman, Kelautan, dan Bahari, bila mengacu pada maknanya, maka artinya mengarah pada hal yang sama, yaitu: Laut. Namun bila mengacu pada sebuah dialektika makna, ketiga kata itu ternyata berbeda. Berdasar data literatur, kata Maritim paralel pengertiannya dengan aktifitasnya, yaitu urusan perdagangan (pelayaran) dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di atas laut. Laut adalah sebagai sarannya, atau obyek dan tempat kegiatannya. Sedangkan Bahari lebih kepada manusia atau orang-orang yang melakukan kegiatan kemaritiman di atas laut dan sekitarnya. Umumnya bahari lebih terkait dengan kebudayaan masa lalu yang mengarah kepada orangnya/ manusianya/ pelakunya, yang dalam istilah Kamus Umum disebut sebagai yang lampau, dahulu kala. Hal ini bisa dimaklumi mengingat kejayaan bahari Indonesia merupakan kisah masa lalu, masa kerajaan. Saat ini budaya bahari telah memudar. Sehingga sebelumnya Bahari diartikan sebagai dahulu kala, kuno, tua sekali, (contoh: zaman bahari = zaman dahulu), indah, elok sekali, mengenai laut, bahari, atau yang dilindungi, misalnya raja bahari berarti raja yang dilindungi (oleh dewa - dewa). Jadi Bahari lebih kepada budayanya, pelakunya, orang-orang yang melakukan atau menjalankan aktifitas kemaritiman dan kelautan di laut. Dari penjelasan tersebut maka akan terlihat bahwa ketiga kata tersebut saling terkait, dimana Laut sebagai lokasi atau

tempat, kemaritiman sebagai sarana dan prasarannya sedangkan bahari adalah pelakunya/ manusianya/ budayanya/ kebiasaan dalam melakukan aktifitas di laut.

Untuk itu jika Indonesia ingin menjadi negara maritim maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangkitkan budaya bahari masa lalu dan membangunnya menjadi budaya bahari masa kini atau budaya modern yang sarat dengan teknologi. Baik teknologi mekanik, teknologi hidrolik, dan teknologi digital.

Mengapa pendidikan budaya bahari? Budaya lahir atau terbentuk dari hasil interaksi antara manusia dan manusia serta antara manusia dengan alam sekitarnya. Manusia adalah pembentuk dan sekaligus pengguna budaya, melalui akal, kecerdasan dan intuisinya, perasaan dan emosi, kemauan, fantasi dan perilaku. Komponen utama kebudayaan adalah individu, masyarakat, dan alam. Budaya bahari lahir dari hasil interaksi antara bangsa Indonesia dengan bentang alam laut dan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar membentuk kepulauan Indonesia. Menurut (Hartono, 2009) Negara Maritim adalah sebuah Negara yang tulang punggung eksistensinya, pengembangannya, kebesaran, dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim. Artinya, Indonesia sebagai Negara Kepulauan harus dilihat secara geografis dan non geografis. Pendekatan geografis dan non geografis tadi harus memerhatikan kondisi obyektif potensi dan hal-hal lain yang nanti dalam proses membangun Negara Maritim akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang berorientasi ke darat menjadi Negara kepulauan yang mendasarkan pada potensi maritim. Meliputi aspek politik, ekonomi, sosial,

budaya bahari dan pertahanan, dan juga harus dilengkapi dengan satu aspek lagi yaitu hukum. Karena budaya bahari dan hukum menjadi dasar dari penentu arah kebijakan. Budaya bahari membentuk karakter Manusiannya menjadi berorientasi maritim. Hukum menjadi dan memberikan arah serta tujuan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Melalui akal, budi dan daya nalarnya manusia dapat menelorkan gagasan dan hasil karya berupa seni, moral, hukum dan kepercayaan. Dengan berjalannya waktu dan seiring dengan praktik yang ada, terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi adat istiadat dalam satu tatanan sosial dan kemasyarakatan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Forde, 1963) “hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan alamnya dijumpai oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki manusia”. Dengan menggunakan kebudayaan inilah manusia mengadaptasi dengan lingkungannya, dan dalam proses adaptasi ini manusia mendayagunakan lingkungannya untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya (Tax, 1953).

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya dan mendorong terwujudnya kelakuan. Dalam definisi ini kebudayaan dilihat sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973). Dengan demikian kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-

model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradley, 1972).

Merujuk Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai (Penasinergi, 2016)

Sementara (Koentjaraningrat, 1964), memandang kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Mengingat pentingnya budaya atau kebudayaan ini maka perkembangan budaya suatu bangsa perlu benar-benar diperhatikan agar tidak melenceng atau menjauhkan dari tujuan semula. Budaya atau Kebudayaan memiliki berbagai unsur, antara lain: (1) peralatan dan perlengkapan hidup (pakaian, perumahan, alat-alat produksi [alat penangkapan ikan], transportasi [kapal]), (2) mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (perikanan, pelayaran, perdagangan), (3) sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, perkawinan), (4) Bahasa, (5) kesenian, (6) sistem pengetahuan, dan (7) religi atau kepercayaan.

Selanjutnya Koentjaraningrat menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong perubahan budaya, antara lain adanya: (1) kontak dengan kebudayaan lain, (2) sistem pendidikan yang maju, (3) sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk

maju, (4) toleransi, (5) sistem lapisan masyarakat yang terbuka, (6) penduduk yang heterogen, (7) ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, (8) orientasi ke depan, (9) nilai meningkatkan taraf hidup. Sedangkan, faktor-faktor yang menghambat budaya, antara lain: (1) kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, (2) perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, (3) sikap masyarakat yang tradisional/konservatif, (4) adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat (*vested interest*), (5) rasa takut terjadinya kegoyahan dalam integrasi kebudayaan, (6) prasangka terhadap hal baru, (7) hambatan ideologis, (8) kebiasaan, dan (9) sikap pasrah. Dengan demikian, untuk mengembalikan budaya bahari menjadi budaya bangsa, perlu memerhatikan faktor-faktor yang berperan dalam membentuk budaya sebagaimana diuraikan di atas.

Dari definisi-definisi di atas maka yang dimaksud dengan pendidikan budaya bahari, yakni sebagai “perilaku hidup dan tata cara manusia sebagai masyarakat suatu bangsa terhadap laut dan pemanfaatan seluruh potensi kekayaan maritim yang ada di dalam, di atas, dan di sekitar laut guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara saat ini dan masa datang dengan menggali dan mengembangkan gagasan/ide berupa pengetahuan, sistem norma sosial dan teknologi yang mendukungnya”. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan wawasan budaya bahari di Indonesia, maka harus dipersiapkan dari sejak usia dini. Jalur yang paling strategi untuk melakukannya yakni melalui jalur pendidikan. Sesuai dengan Undang-

Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa jalur pendidikan dapat melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan maka muatan pendidikan budaya bahari harus diwujudkan ke dalam materi-materi dan kompetensi yang dibuat secara bergradasi. Untuk melihat materi dan kompetensi tersebut bisa ditelusuri pada struktur kurikulumnya. Pada jalur pendidikan formal dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang mengandung muatan budaya bahari dalam pembelajaran yang meliputi tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta memberikan cara penilaian yang tepat terhadap capaian ketiga aspek tersebut.

Pada jenjang pendidikan menengah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah lebih dahulu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan kebaharian yaitu seperti yang termuat pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) terdapat salah satu bidang keahlian dengan nomenklatur Bidang Keahlian Perikanan dan Kelautan, kemudian disempurnakan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor 4678/D/KEP/MAK/2016 Tentang Spektrum Keahlian PMK dengan nomenklatur yang diubah menjadi Bidang Keahlian Kemaritiman. Menurut Kep. Dirjen Nomor 7013/D/KP/2013 nomenklatur Bidang Perikanan dan Kelautan memiliki 3 program keahlian dan 7 paket keahlian yaitu seperti tercantum dalam tabel 1.

Sedangkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4678/D/KEP/MAK/2016, ada perubahan nomenklatur bidang keahlian menjadi Kemaritiman, ada penambahan program keahlian menjadi 4, ada perubahan nomenklatur dari paket keahlian menjadi kompetensi keahlian. Semula ada 7 paket keahlian

menjadi 10 kompetensi keahlian. Secara rinci seperti dalam tabel 2.

Struktur kurikulum yang tersebut di atas yakni yang dapat dipelajari oleh peserta didik/siswa-siswi (selanjutnya disebut siswa) yang menempuh pendidikan di SMK. Sementara siswa dari satuan SMK bidang keahlian yang lain, SMA/MA, SMP/MTs, SD/MI, dan Pendidikan Anak Usia Dini tidak mendapatkan pengetahuan atau wawasan kebaharian di atas. Beranjak dari pemikiran bahwa luas wilayah Indonesia ini sebagian besar meliputi wilayah lautan maka wawasan tentang kebaharian ini pun seharusnya tidak saja dimiliki siswa-siswi dari SMK Bidang Keahlian Kemaritiman saja.

**Tabel 1.** Program Keahlian & Paket Keahlian

Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian	Nomor Kode
Perikanan dan Kelautan	1. Teknologi penangkapan Ikan	1.1 Nautika Kapal Penangkapan Ikan	092
		1.2 Teknik Kapal Penangkap Ikan	093
	2. Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya	2.1 Budidaya Perikanan	094
		2.2 Budidaya Krustacea	095
		2.3 Budidaya Kekerangan	096
		2.4 Budidaya Rumput Laut	097
	3. Pelayaran	3.1 Nautika Kapal Niaga	098

Sumber: Kajian Literatur, 2018

**Tabel 2.** Program Keahlian & Kompetensi Keahlian

Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Nomor Kode
Kemaritiman	1. Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	1.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan	098
		1.2 Teknik Kapal Penangkap Ikan	099
	2. Pelayaran Kapal Niaga	2.1 Nautika Kapal Niaga	100
		2.2 Teknik Kapal Niaga	101
	3. Perikanan	3.1 Agribisnis Perikanan Air Tawar	102
		3.2 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	103
		3.3 Agribisnis Ikan Hias	104
		3.4 Agribisnis Rumput Laut	105
		3.5 Industri Perikanan Laut	106
	4. Pengolahan Hasil Perikanan	4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	107

Sumber: Kajian Literatur, 2018

Namun semestinya dimiliki oleh siswa-siswi jenjang pendidikan umum dan dari usia dini. Hal ini seiring dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Jauh sebelum program pemerintah ini dicetuskan, Yayasan Hang Tuah yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan di bawah naungan TNI AL sejak tahun 1984 telah mengembangkan dan menerapkan mata pelajaran Muatan Lokal yang bernama Pendidikan Kebaharian. Bahkan Yayasan ini sudah mengembangkan bahan ajar dari TK, Kelas I hingga XII (Yayasan Hangtuah, 2016).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka merealisasikan program pemerintah di atas, pada tahun 2017 telah mengembangkan Kurikulum Kemaritiman (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2017). Kurikulum Kemaritiman ini beranjak pada pemikiran bahwa wawasan kebaharian harus menjadi semangat siswa dan siswi bangsa Indonesia untuk tidak lupa atau bahkan agar “melek” dengan kekayaan dan memiliki kebanggaan menjadi negara kepulauan beserta kekayaan yang ada di dalamnya. Kurikulum ini dikembangkan secara terstruktur dan berjenjang dari Pendidikan Anak Usia Dini, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Non Bidang Keahlian Kemaritiman. Adapun ruang lingkup materi Kurikulum Kemaritiman ini terdiri atas 5 (lima) aspek sebagai berikut.

- 1) Sumber Daya Maritim
- 2) Geomaritim dan Dinamika Laut
- 3) Transportasi Laut dan Industri Maritim

- 4) Sejarah, Budaya, dan Inovasi Maritim
- 5) Geopolitik, Hukum, dan Keamanan Maritim.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas kemudian dijabarkan ke dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD) dari jenjang Paud, Kelas I hingga XII. Dengan demikian, satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang berminat untuk mengajarkan muatan kemaritiman dapat menggunakan kurikulum ini. Bahkan untuk mendukung implementasi dari Kurikulum Kemaritiman tersebut sudah terjalin kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam bentuk Memorandum of Understanding (Mei 2017) dan Perjanjian Kerja Sama (Agustus 2017) serta melakukan rapat koordinasi di 12 kabupaten/kota di 12 Provinsi untuk melaksanakan sekolah rintisan.

Peningkatan wawasan kebaharian juga dapat dilakukan melalui Pendidikan Budaya Bahari. Ini bukan merupakan kurikulum tersendiri namun salah satu upaya untuk mendukung atau melengkapi dari pelaksanaan kurikulum kemaritiman untuk pendidikan umum yang sudah ada sebelumnya.

Pendidikan Budaya Bahari seperti yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki pengertian sebagai “perilaku hidup dan tata cara manusia sebagai masyarakat suatu bangsa terhadap laut dan pemanfaatan seluruh potensi kekayaan maritim yang ada di dalam, di atas, dan di sekitar laut guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara saat ini dan masa datang dengan menggali dan mengembangkan gagasan/ide berupa pengetahuan, sistem norma sosial dan teknologi yang mendukungnya”. Hal ini

sejalan dengan penelitian (Yunandar, 2004) yang menyebutkan bahwa budaya bahari mengandung unsur-unsur seperti unsur pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, aturan, simbol komunikatif, kelembagaan, teknologi, dan seni.

Dari definisi di atas maka dapat diuraikan ke dalam ruang lingkup dari budaya bahari meliputi enam aspek (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2017) yaitu:

- 1) Sejarah pelayaran dan terbentuknya bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari;
- 2) Komunitas bahari (Suku Laut, Komunitas Nelayan dan Komunitas Pelayaran); sejarah, sebaran dan karakteristik umum;
- 3) Bahasa dan sistem komunikasi;

- 4) Mata Pencaharian Hidup/sistem ekonomi [nelayan (termasuk mengumpulkan kerang-kerangan di pantai atau gleaning, budidaya (aquaculture), pelayaran, wisata bahari], dan Teknologi;
- 5) Religi dan Kesenian; dan
- 6) Pengelolaan sumberdaya laut tradisional (pemeliharaan ekosistem laut dan pesisir).

Dari masing-masing ruang lingkup di atas dijabarkan menjadi aspek-aspek. Aspek-aspek ini adalah pengembangan lebih rinci dari yang ada di ruang lingkup. Pengembangan dari aspek-aspek ini juga dimaksudkan memperjelas dari bidang kajian yang akan dipelajari. Secara rinci pengembangan aspek dapat dibaca pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Pengembangan Aspek

RUANG LINGKUP	ASPEK
1. Sejarah pelayaran dan terbentuknya bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari serta bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan Sejarah Negara-negara maritim di dunia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan pelayaran Indonesia</li> <li>2. Jalur pelayaran-transportasi laut dan konektivitas antar pulau</li> <li>3. Jaringan pelayaran dengan bangsa lain</li> <li>4. Profesi kemaritiman zaman dulu dan zaman sekarang</li> <li>5. Mengenal Negara-negara maritim di dunia</li> <li>6. Mengenal teknologi pelayaran dari zaman dulu sampai zaman sekarang</li> </ol>
2. Komunitas Maritim (Suku Laut, Komunitas Nelayan dan Komunitas Pelayaran); sejarah, sebaran dan karakteristik umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suku-suku bangsa bahari di nusantara dan Negara-negara maritim di dunia</li> <li>2. Mengenal profesi-profesi yang ada di bidang kemaritiman</li> </ol>
3. Bahasa dan sistem komunikasi	Rumpun Bahasa Austronesia

RUANG LINGKUP	ASPEK
4. Mata Pencaharian Hidup/sistem ekonomi dan Teknolog	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem pengetahuan tradisional: Pengetahuan tentang sumber daya ikan dan ekosistemnya, geografi laut, pengetahuan ttg meteorologi , astronomi:</li> <li>b. Perlengkapan Menangkap Ikan(Perahu, rakit, alat-alat tangkap)</li> <li>c. Sistem kerja sama dan pengorganisasian dalam penangkapan dan perdagangan ikan kapal ikan, wilayah tangkapan dan sistem lalu-lintas, rambu-rambu di laut.</li> </ol> </li> <li>2. Pengolahan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan pengolahan</li> <li>b. Teknik Pengolahan</li> <li>c. Pengemasan dan penyimpanan</li> <li>d. Pemasaran</li> </ol> </li> <li>3. Pelayaran Tradisional/Rakyat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengetahuan tradisional tentang geografi laut, ilmu falak, meteorologi,</li> <li>b. Pengetahuan navigasi dan pembuatan perahu dan kapal (<i>traditional kit building technology</i>)</li> <li>c. Jenis-jenis perahu, kapal, layar, dan tali temali</li> <li>d. Sistem kerja sama dalam pelayaran</li> </ol> </li> <li>4. Pelayaran modern:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis-jenis kapal dan fungsinya</li> <li>b. Bagian-bagian kapal</li> <li>c. Peralatan dan perlengkapan kapal</li> <li>d. Keselamatan dan keamanan kapal</li> <li>e. Teknologi perkapalan</li> <li>f. Pelabuhan dan prasarananya</li> <li>g. Bagian-bagian pelabuhan dan teknologinya</li> <li>h. Organisasi kapal, administrasi pelabuhan</li> </ol> </li> <li>5. Budidaya perikanan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rumput laut</li> <li>b. Ikan</li> <li>c. Kerang-kerangan</li> <li>d. Udang</li> </ol> </li> </ol>

RUANG LINGKUP	ASPEK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mutiara</li> <li>6. Wisata:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerajinan</li> <li>b. Pemandu wisata</li> <li>c. Kuliner</li> <li>d. Obyek wisata bahari dan wisata maritim</li> <li>e. Wisata pelayaran tradisional dan modern</li> <li>f. Olahraga bahari dan olah raga maritim</li> </ul> </li> </ul>
5. Religi dan Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perintah Agama terkait dengan laut dan kemaritiman</li> <li>2. Sistem Kepercayaan</li> <li>3. Ritual / upacara tradisional sebelum melaut</li> <li>4. Kesenian tradisional</li> </ul>
6. Pengelolaan sumberdaya laut tradisional (pemeliharaan ekosistem laut dan pesisir) dan modern (pertambangan, industri perikanan, Industri dan jasa maritim, industri pelayaran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebangkitan industri dan jasa maritim</li> <li>2. Profesi-profesi maritim</li> <li>3. Menjaga lingkungan</li> <li>4. Konservasi (melindungi untuk tidak punah)</li> <li>5. Budi daya</li> <li>6. Penggunaan alat ramah lingkungan</li> <li>7. Kearifan lokal</li> <li>8. Pengenalan polusi laut</li> <li>9. Adaptasi dan mitigasi bencana</li> </ul>

Sumber: Kajian Literatur, 2018

Muatan pendidikan yang tertuang di dalam aspek sebagai penjabaran dari ruang lingkup di atas sebenarnya lebih diorientasikan kepada pembentukan sikap dan nilai-nilai utama seperti pengetahuan dan ketrampilan navigasi, adaptasi lingkungan fisik dan sosial budaya, konsep ruang perairan, keberanian berpetualang, kerja keras dan kompetitif, jujur dan terpercaya, setia dan bertanggung jawab, keterbukaan dan kebebasan, religius, dan kolektivisme yang diterapkan dalam kegiatan dagang dan pelayaran oleh mereka yang dipahami sebagai nilai-nilai budaya bahari. Nilai budaya bahari yang berciri ke-Indonesiaan

sebenarnya tergambar kepada pelaut-pelaut dari Bugis-Makassar dalam bentuk kesadaran akan keberagaman kebudayaan dan hubungan antaretnik, cinta pada negara, bahasa nasional, dan kebangsaan. (Lampe, 2012). Lebih lanjut semangat budaya bahari dan nasionalisme, serta sikap keterbukaan pelaut Bugis-Makassar merupakan kristalisasi dari pengalaman panjang yang dimiliki dalam berlayar mengarungi samudra. Wawasan budaya bahari inilah yang berkontribusi dalam menjaga kesatuan dan hubungan sosial antarbangsa secara turun temurun (Lampe, 2012).

Untuk itu jika Indonesia ingin menjadi negara bahari yang modern, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangkitkan budaya bahari masa lalu dan membangunnya menjadi budaya bahari masa kini yang modern yang sarat dengan teknologi. Baik teknologi mekanik, teknologi hidrolik dan teknologi digital.

Selanjutnya bagaimana mengimplementasikan pesan pendidikan budaya bahari ini di sekolah. Tentu saja muatan tentang pendidikan budaya bahari yang telah disusun yang tersebut di atas dikembangkan dengan memerhatikan kebutuhan dan keadaan daerah dan sekolah masing-masing. Demikian juga dengan pengimplementasiannya tentu juga disesuaikan dengan kondisi sekolah/daerah tersebut.

Adapun merujuk kepada pengertian implementasi terhadap muatan kurikulum sesuai dengan pengertiannya seperti yang dikemukakan oleh (Miller & Seller, 1985) ada tiga pendekatan, yaitu: a). Implementasi didefinisikan sebagai kegiatan, b). Implementasi sebagai suatu usaha meningkatkan proses interaksi antara pengembang guru dengan guru, c). Implementasi merupakan sesuatu yang terpisah dari komponen kurikulum. Hal yang sama dikemukakan oleh Fulan & Pomfret, (Hasan, 1984) menyatakan bahwa implementasi kurikulum adalah “usaha merelisasikan ide, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum tertulis menjadi kenyataan”.

Beranajak dari pengertian implementasi tersebut, maka implementasi muatan pendidikan Budaya Bahari dapat dikembangkan ke dalam empat model (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2017) yakni intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pembiasaan dan budaya

sekolah. Lebih lanjut disebutkan bahwa di dalam intrakurikuler meliputi 3 bentuk lagi yaitu kontekstualisasi, integrasi/pengayaan, dan muatan lokal. Sementara menurut hemat penulis implementasi muatan pendidikan Budaya Bahari ini perlu lebih disederhanakan lagi menjadi 4 bentuk, yaitu (1) kontekstualisasi/warna mata pelajaran, (2) pengayaan/integrasi dalam mata pelajaran, (3) ekstrakurikuler dan budaya sekolah, serta (4) mata pelajaran tersendiri. Penjelasan dari masing-masing model sebagai berikut.

#### *Kontekstualisasi/Warna Mata Pelajaran/Blended*

Muatan kurikulum sebagai konteks pembelajaran sesuai dengan KD yang relevan pada semua mata pelajaran. Tidak menambah jam tetapi memperkuat hasil pembelajaran sesuai dengan konteks kehidupan siswa.

Implementasi muatan Budaya Bahari dan Budaya Bahari ke dalam mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Muatan Pembelajaran menjadi konteks mata pelajaran pada kompetensi-kompetensi terkait pada tema-tema yang ada.
- 2) Tidak ada penambahan alokasi waktu.
- 3) Dilakukan dengan cara mengaitkan kompetensi dengan materi-materi kemaritiman yang berhubungan dengan tema-tema yang ada.

#### *Pengayaan/Integrasi dalam Mata Pelajaran*

Muatan pembelajaran/materi pembelajaran yang terkait dengan karakteristik/kondisi daerah/ diversifikasi ditambahkan dalam mata pelajaran yang relevan untuk

pengayaan. Namun hal ini akan menambah alokasi waktu. Sehingga perlu diperhitungkan antara mata pelajaran Muatan Lokal dengan penambahan KD pada mata pelajaran yang relevan tersebut.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun dengan analisis konteks yang dikendalikan melalui kepemimpinan kepala sekolah untuk menentukan fokus-fokus muatan pembelajaran apa saja yang akan diimplementasikan di sekolahnya.

#### *Ekstrakurikuler dan Budaya Sekolah*

Model ini melalui kegiatan Ekstrakurikuler/ Pengembangan Diri/ Pembiasaan. Kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya terdiri atas ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler dapat menemukan dan mengembangkan potensi siswa, serta memberikan manfaat sosial yang besar dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain. Di samping itu, kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi bakat, minat, dan kreativitas siswa yang berbeda-beda.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh siswa di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian siswa secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh siswa. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan

ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan dapat diikuti oleh siswa sesuai bakat dan minatnya masing-masing.

Beberapa bentuk dari kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dapat berupa:

- 1) Krida, seperti Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
- 2) Karya ilmiah, seperti Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
- 3) Latihan olah-bakat latihan olah-minat, seperti pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, fotografi, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, menjahit, memahat, dan lainnya;
- 4) Karya olah makanan, seperti tata boga, patiseri, dan lainnya;
- 5) Keagamaan, seperti pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis alquran, retreat; atau bentuk kegiatan lainnya.

Dalam pelaksanaan ekstrakurikuler ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain tentang prinsip pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan penilaian. Berikut penjelasan dari keduanya.

#### *Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler*

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip: (1) partisipasi aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan siswa secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing; dan (2) menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler

dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi siswa.

Kegiatan ekstrakurikuler pilihan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi siswa sesuai bakat dan minat siswa. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pilihan di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui tahapan: (1) analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; (2) identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat siswa; (3) menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan; (4) mengupayakan sumber daya sesuai pilihan siswa atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya; (5) menyusun program kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam hal kegiatan ekstrakurikuler, satuan pendidikan wajib menyusun program kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Program kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus/klaster sekolah. Penggunaannya difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program kegiatan ekstrakurikuler disosialisasikan kepada siswa dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.

Sistematika program kegiatan ekstrakurikuler sekurang-kurangnya memuat: (1) rasional dan tujuan umum; (2) deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler; (3) pengelolaan termasuk organisasi pengelolanya; (4) pendanaan; dan (5) evaluasi.

#### *Penilaian*

Kinerja siswa yang ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler perlu

mendapat penilaian dan dideskripsikan dalam laporan hasil belajar siswa/rapor. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan pencapaian kompetensi siswa dalam aktivitas kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif.

Siswa wajib memperoleh nilai minimal “baik” pada Pendidikan Kepramukaan pada setiap semesternya. Nilai yang diperoleh pada Pendidikan Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas siswa. Bagi siswa yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan secara terus menerus untuk mencapainya.

#### *Mata Pelajaran Tersendiri*

Strand/muatan pembelajaran/materi pembelajaran dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang diajarkan tersendiri. Jika sekolah/madrasah menginginkan muatan terkait dengan materi dan kompetensi yang terstruktur dapat mengadopsi pada kurikulum kemaritiman dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Demikian juga dapat mengembangkan materi dan kompetensi dengan mengacu pada ruang lingkup dan aspek-aspek pada muatan pendidikan budaya bahari yang telah dibahas sebelumnya.

#### **SIMPULAN**

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia ( $\pm 81.000$  km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, perairan laut di Indonesia dikenal sebagai salah satu daerah “mega biodiversity” penting di dunia dan juga

mengandung potensi sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Potensi sumber daya alam yang besar ini merupakan sumber ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara kita harus memiliki sumberdaya manusia yang handal, kreatif, inovatif; yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta wawasan dan budaya bahari yang kuat dilandasi dengan semangat bela negara agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Sumber daya manusia tentu haruslah dipersiapkan melalui jalur pendidikan, baik jalur formal, non-formal, dan informal. Inilah yang menjadi faktor penting dimana untuk mengelola sumber daya alam khususnya kelautan dengan kekayaan di dalamnya yang sangat melimpah sehingga diperlukan Pendidikan Budaya Bahari.

Pendidikan budaya bahari yang dimaksud yakni perilaku hidup dan tata cara manusia sebagai masyarakat suatu bangsa terhadap laut dan pemanfaatan seluruh potensi kekayaan maritim yang ada di dalam, di atas, dan di sekitar laut guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara saat ini dan masa datang dengan menggali dan mengembangkan gagasan/ide berupa pengetahuan, sistem norma sosial dan teknologi yang mendukungnya.

Budaya lahir atau terbentuk dari hasil interaksi antara manusia dan manusia serta antara manusia dengan alam sekitarnya. Manusia adalah pembentuk dan sekaligus pengguna budaya, melalui akal, kecerdasan dan intuisinya, perasaan dan emosi, kemauan, fantasi dan perilaku. Komponen utama kebudayaan adalah individu, masyarakat, dan alam. Budaya

bahari lahir dari hasil interaksi antara bangsa Indonesia dengan bentang alam laut dan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar membentuk kepulauan Indonesia.

Agar mudah dipelajari oleh siswa maka diperlukan muatan terkait dengan budaya bahari yakni sebagai berikut;

- 1) Sejarah pelayaran dan terbentuknya bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari;
- 2) Komunitas bahari (Suku Laut, Komunitas Nelayan dan Komunitas Pelayaran); sejarah, sebaran dan karakteristik umum;
- 3) Bahasa dan sistem komunikasi;
- 4) Mata Pencaharian Hidup/sistem ekonomi [nelayan (termasuk mengumpulkan kerang-kerangan di pantai atau gleaning, budidaya (aquaculture), pelayaran, wisata bahari], dan Teknologi;
- 5) Religi dan Kesenian; dan
- 6) Pengelolaan sumberdaya laut tradisional (pemeliharaan ekosistem laut dan pesisir).

Dari ke enam aspek tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi sub aspek-sub aspek yang lebih terinci lagi. Kemudian dari sub aspek tersebut diaplikasikan ke dalam berbagai kegiatan yang dilakukan baik di dalam kelas, luar kelas, dan lingkungan sekitar sekolah.

Adapun bentuk implementasinya di sekolah, muatan pendidikan budaya bahari ini dapat diwujudkan melalui 4 bentuk kegiatan, yaitu (1) kontekstualisasi/warna mata pelajaran, (2) pengayaan/integrasi dalam mata pelajaran, (3) ekstrakurikuler dan budaya sekolah, serta (4) mata pelajaran tersendiri. Ke empat bentuk kegiatan ini dapat dipilih oleh satuan pendidikan atau sekolah disesuaikan dengan kesiapan

sumberdaya yang dimiliki. Artinya ketika sekolah belum mampu untuk melaksanakan pendidikan budaya bahari sebagai mata pelajaran tersendiri atau sebagai Muatan Lokal yang ada pada poin (4) karena mungkin terkendala tidak ada guru dan daya dukung yang lainnya, maka sekolah dapat memilih bentuk kegiatan yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambariyanto, & Denny, N. S. (2012). Kajian Pembangunan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 6(2).
- Ardiwidjaja, R. (2016). Pelestarian Warisan Budaya Bahari: Daya Tarik Kapal Tradisional Sebagai Kapal Wisata. *Kalpataru, Majalah Arkeologi*, 25(1), 65–74.
- BPS. (2014). *Statistik Indonesia 2014*. Badan Pusat Statistik.
- Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dishidros TNI AL. (2004). *Katalog Peta Laut dan Buku Nautika Indonesia*. Jakarta: Dishidros TNI AL.
- Forde, C. (1963). *Habitat Economy and Society*. New York: Dutton.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books Inc.
- Hartono, D. (2009). *Membangun Negara Maritim Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Pertahanan*. Indonesia Maritim Institute (IMI).
- Hasan, S. H. (1984). *An Evaluation of the 1975 General Senior Secondary Social Studies Curriculum Implementation in Bandung Municipality*. Macquarie University.
- Koentjaraningrat. (1964). *Masyarakat desa di Indonesia masa ini*. Jakarta: FE-UI.
- Lampe, M. (2012). Bugis–Makassar Seamanship And Reproduction Of Maritime Cultural Values In Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 24(2).
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2016). Inilah Status Terumbu Karang Indonesia Terkini. Retrieved March 7, 2017, from [http://lipi.go.id/berita/inilahstatus-terumbu-karang-indonesia-terkini/15024/pers\\_realese\\_11\\_Februari\\_2016/](http://lipi.go.id/berita/inilahstatus-terumbu-karang-indonesia-terkini/15024/pers_realese_11_Februari_2016/)
- Miller, J. P., & Seller, W. (1985). *Curriculum Perspectives and Practice*. New York: Longman.
- Motik, C. (2010). *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim: 75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA, IND HILL.CO*. Jakarta.
- Penasinerigi. (2016). Pendidikan Versi Ki Hajar Dewantara. Retrieved January 16, 2018, from <https://penasinerigi.wordpress.com/2016/03/21/pendidikan-versi-ki-hajar-dewantara>
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2017). *Naskah Akademik Diversifikasi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Samekto, A. P. (2017). *Permasalahan Pesisir Dan Sumber Daya Laut Manajemen Di Indonesia*.

- Retrieved from [Jurnal.stimart-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/download/91/34](http://Jurnal.stimart-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/download/91/34).
- Spradley, J. P. (1972). Culture and Stress: A Quantitative Analysis. *American Anthropologist*, 74(3).
- Sungkawa, D. (2017). No Title. Retrieved November 27, 2017, from [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/195502101980021\\_DADANG\\_SUNGKAWA/Bahan\\_Ajar\\_GRI/GRI\\_Gabungan\\_Cetak.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195502101980021_DADANG_SUNGKAWA/Bahan_Ajar_GRI/GRI_Gabungan_Cetak.pdf)
- Tax, S. (1953). *Penny Capitalism. A Case Study Dealing With a Guatemalan Indian Economy*.
- Tinambunan, H. S. R. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya Maritim Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(1).
- Yunandar. (2004). Budaya Bahari dan Tradisi Nelayan di Indonesia. *Sabda*, 22–35.